

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pelaksanaan internal audit pemerintah terhadap peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah pada wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

#### **1.1 Simpulan**

1. Penerapan audit kinerja di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung secara garis besar telah diterapkan dengan memadai dengan rata-rata sebesar 60.63333, hal ini dapat ditunjukkan melalui perolehan skor jawaban responden yang positif secara keseluruhan sebesar 96.45%. Ini membuktikan bahwa Penerapan Audit Kinerja telah dilaksanakan secara memadai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Penerapan audit kinerja yang telah diterapkan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan melalui perhitungan koefisien determinasi (Kd) Penerapan Audit Kinerja berpengaruh positif sebesar 48.72% terhadap Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Sementara sisanya yaitu sebesar 51.28% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Penerapan Audit Kinerja.

## 5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh dalam skripsi ini bukanlah suatu hasil yang mutlak. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian sosial yang hasilnya dapat berubah setiap saat.

Meskipun secara garis besar penerapan audit kinerja terhadap akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan dengan memadai dan baik, penulis merasa Oleh karena itu mencoba mengajukan beberapa saran atau masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar didapat hasil penelitian yang lebih baik. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk Penerapan Audit Kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
  - a. Pengadaan dan penggunaan baik sumber daya maupun pegawai harus lebih efisien dan efektif.
  - b. Perlu ditingkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan audit/pemeriksaan.
  - c. Selain itu juga perlunya menentukan dan merencanakan program-program audit/pemeriksaan dengan lebih baik lagi.
  - d. Perbaikan untuk memperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan yang lebih banyak.
  - e. Peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
  - f. Menetapkan pencapaian tujuan pemeriksaan dengan lebih terukur.
  - g. Lebih banyak lagi memiliki alternatif-alternatif program.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah serupa penulis menyarankan agar meneliti pada program-program lain yang dibuat baik Pemerintah Pusat maupun Daerah agar dapat menjadi pembanding ataupun penelitian pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja selain penerapan audit kinerja.